

## **Konflik Nagorno-Karabakh antara Armenia dan Azerbaijan (2020-2023): Dinamika Sengketa Wilayah dan Keamanan Regional di Kaukasus Selatan**

**Paulina Sriyati Magi Balawanga<sup>1\*</sup>, Dwi Amelinda Kalla<sup>1</sup>, Yeyen Subandi<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Respati Yogyakarta, Indonesia

\*Corresponding author : [paulinasriyati@gmail.com](mailto:paulinasriyati@gmail.com)

---

### **Article History:**

Received : 26-01-2026

Accepted : 31-01-2206

**Keywords:** Nagorno-Karabakh;  
Armenia; Azerbaijan; Konflik  
Regional; Keamanan Kawasan

### **ABSTRAK**

Konflik Nagorno-Karabakh antara Armenia dan Azerbaijan merupakan salah satu konflik teritorial paling kompleks di kawasan Kaukasus Selatan yang kembali mengalami eskalasi signifikan pada periode 2020–2023. Konflik ini dipicu oleh sengketa wilayah, perbedaan identitas etnis, serta kepentingan politik dan keamanan kedua negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika konflik Nagorno-Karabakh antara Armenia dan Azerbaijan pada periode 2020–2023 serta implikasinya terhadap keamanan regional di Kaukasus Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus melalui analisis data sekunder berupa jurnal ilmiah, laporan organisasi internasional, dan dokumen resmi terkait. Kerangka teoretis yang digunakan adalah teori realisme dan konsep keamanan regional untuk menjelaskan kepentingan negara, distribusi kekuasaan, serta peran aktor regional dan internasional dalam konflik tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan militer Azerbaijan pada 2020 dan konsolidasi kekuasaan pada 2023 telah mengubah konfigurasi kekuatan regional, sekaligus meningkatkan ketergantungan keamanan kawasan terhadap aktor eksternal seperti Rusia dan Turki. Konflik ini tidak hanya berdampak pada stabilitas politik dan keamanan Armenia dan Azerbaijan, tetapi juga berimplikasi luas terhadap keamanan regional Kaukasus Selatan dan arsitektur keamanan Eropa secara keseluruhan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konflik Nagorno-Karabakh mencerminkan keterkaitan erat antara sengketa teritorial dan dinamika keamanan regional dalam sistem internasional kontemporer.

---

## **PENDAHULUAN**

Kawasan Kaukasus Selatan merupakan salah satu wilayah strategis dalam dinamika politik dan keamanan regional yang menghubungkan Eropa Timur, Asia Barat, dan Asia Tengah. Letak geografis yang berada di persimpangan jalur geopolitik dan ekonomi internasional menjadikan kawasan ini memiliki nilai strategis yang tinggi, sekaligus rentan terhadap konflik. Kerentanan tersebut terutama dipicu oleh sengketa wilayah, keberagaman etnis, serta persaingan kepentingan geopolitik negara-negara besar yang berkepentingan di kawasan tersebut (Cornell, 2017). Salah satu konflik paling berkepanjangan dan kompleks di Kaukasus Selatan adalah konflik Nagorno-Karabakh antara Armenia dan Azerbaijan. Wilayah Nagorno-Karabakh secara hukum internasional diakui sebagai bagian dari kedaulatan Azerbaijan, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun demikian, wilayah ini secara historis dan demografis didominasi oleh etnis Armenia, yang kemudian memunculkan klaim tandingan atas dasar identitas dan sejarah. Perbedaan klaim tersebut telah memicu konflik bersenjata sejak runtuhnya Uni Soviet pada awal 1990-an

dan menciptakan ketegangan berkepanjangan yang sulit diselesaikan secara damai (De Waal, 2013).

Upaya penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi telah dilakukan selama beberapa dekade, terutama melalui mekanisme mediasi yang dipimpin oleh Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) Minsk Group. Namun, proses negosiasi tersebut tidak menghasilkan penyelesaian permanen dan cenderung mempertahankan status quo yang rapuh. Akibatnya, konflik Nagorno-Karabakh terus mengalami siklus eskalasi dan deeskalasi, dengan potensi kekerasan yang selalu muncul kembali dalam situasi tertentu (Broers, 2019). Eskalasi konflik kembali terjadi secara signifikan pada tahun 2020 melalui perang enam minggu antara Armenia dan Azerbaijan. Konflik bersenjata ini berakhir dengan kemenangan militer Azerbaijan dan penandatanganan perjanjian gencatan senjata yang dimediasi oleh Rusia. Perang tahun 2020 tidak hanya mengubah peta kontrol wilayah secara drastis, tetapi juga menandai pergeseran penting dalam keseimbangan kekuatan regional. Azerbaijan berhasil merebut kembali sebagian besar wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Armenia, sehingga mengakhiri status quo yang telah berlangsung selama hampir tiga dekade (International Crisis Group, 2020).

Pasca-perang 2020, ketegangan antara Armenia dan Azerbaijan tidak sepenuhnya mereda. Periode 2021–2023 ditandai oleh berbagai insiden militer di wilayah perbatasan, krisis kemanusiaan, serta meningkatnya tekanan politik dan keamanan di kawasan Nagorno-Karabakh. Situasi ini mencapai puncaknya pada tahun 2023 ketika Azerbaijan berhasil mengambil alih kendali penuh atas wilayah Nagorno-Karabakh, yang kemudian memicu eksodus besar-besaran penduduk etnis Armenia dari wilayah tersebut. Peristiwa ini menimbulkan perhatian luas dari komunitas internasional, khususnya terkait isu keamanan manusia dan perlindungan hak asasi manusia (Human Rights Watch, 2023). Selain berdimensi lokal dan bilateral, konflik Nagorno-Karabakh juga memiliki implikasi regional dan internasional yang signifikan. Keterlibatan aktor eksternal seperti Rusia dan Turki memperlihatkan bahwa konflik ini merupakan bagian dari dinamika geopolitik yang lebih luas. Rusia berperan sebagai mediator sekaligus penjaga perdamaian, sementara Turki secara terbuka mendukung Azerbaijan sebagai bagian dari strategi geopolitik dan keamanan regionalnya. Di sisi lain, Uni Eropa mulai meningkatkan keterlibatannya melalui inisiatif diplomatik dan misi pemantauan, yang mencerminkan meningkatnya perhatian Eropa terhadap stabilitas Kaukasus Selatan (Delcour & Wolczuk, 2021).

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa konflik Nagorno-Karabakh tidak lagi dapat dipahami sebagai konflik lokal semata, melainkan sebagai bagian dari arsitektur keamanan regional yang memengaruhi stabilitas kawasan Eropa secara lebih luas. Kaukasus Selatan berfungsi sebagai wilayah penyangga (*buffer zone*) dalam sistem keamanan Eropa, sehingga instabilitas di kawasan ini berpotensi berdampak pada kepentingan keamanan regional dan internasional. Dalam konteks ini, konflik Nagorno-Karabakh menjadi relevan untuk dikaji melalui perspektif Hubungan Internasional, khususnya dalam kerangka keamanan regional dan sengketa teritorial. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memandang penting untuk menganalisis dinamika konflik Nagorno-Karabakh antara Armenia dan Azerbaijan pada periode 2020–2023. Fokus penelitian diarahkan pada perubahan konfigurasi kekuatan, peran aktor regional dan internasional, serta implikasi konflik terhadap keamanan regional di Kaukasus Selatan. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

akademik dalam memahami pola konflik regional dan interaksinya dengan sistem keamanan internasional kontemporer.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan desain studi kasus. Menurut Mulyana (2008), penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang menggunakan prosedur ilmiah untuk memahami suatu fenomena secara mendalam melalui deskripsi data dan fakta dalam bentuk kata-kata. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika konflik Nagorno-Karabakh antara Armenia dan Azerbaijan secara komprehensif, khususnya terkait proses konflik, peran aktor, serta implikasinya terhadap keamanan regional di Kaukasus Selatan.

Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena konflik secara sistematis dan faktual pada periode 2020–2023 tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel penelitian. Data penelitian diperoleh melalui analisis data sekunder berupa jurnal ilmiah, laporan organisasi internasional, serta dokumen resmi yang relevan. Analisis data dilakukan dengan menginterpretasikan peristiwa, kebijakan, dan interaksi antaraktor berdasarkan perspektif Hubungan Internasional, sehingga dapat memberikan pemahaman yang utuh mengenai konflik Nagorno-Karabakh dalam konteks keamanan regional.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Konflik Nagorno-Karabakh merupakan salah satu konflik teritorial paling kompleks dan berkepanjangan di kawasan Kaukasus Selatan. Kompleksitas konflik ini tidak hanya disebabkan oleh perbedaan klaim wilayah antara Armenia dan Azerbaijan, tetapi juga oleh interaksi faktor sejarah, etnis, politik, serta kepentingan geopolitik regional dan internasional. Untuk memahami dinamika konflik Nagorno-Karabakh pada periode 2020–2023, diperlukan analisis yang komprehensif yang mencakup akar historis konflik, eskalasi militer, peran aktor eksternal, serta implikasinya terhadap keamanan regional. Secara historis, konflik Nagorno-Karabakh berakar pada kebijakan administratif Uni Soviet. Pada masa pemerintahan Soviet, wilayah Nagorno-Karabakh ditetapkan sebagai *autonomous oblast* di dalam Republik Sosialis Soviet Azerbaijan, meskipun mayoritas penduduknya merupakan etnis Armenia. Penetapan ini menciptakan ketegangan struktural antara prinsip kedaulatan teritorial dan hak penentuan nasib sendiri (*self-determination*). Selama periode Soviet, ketegangan tersebut relatif terkontrol oleh kekuatan negara pusat, namun tidak pernah sepenuhnya terselesaikan.

Runtuhnya Uni Soviet pada awal 1990-an membuka ruang bagi munculnya nasionalisme etnis dan tuntutan kedaulatan di berbagai wilayah bekas Soviet, termasuk Nagorno-Karabakh. Armenia dan Azerbaijan yang baru merdeka sama-sama mengklaim wilayah tersebut sebagai bagian integral dari negara mereka. Ketegangan ini kemudian berkembang menjadi konflik bersenjata terbuka antara tahun 1992–1994. Konflik tersebut berakhir dengan kemenangan militer Armenia dan pendudukan wilayah Nagorno-Karabakh serta beberapa distrik di sekitarnya. Sejak saat itu, konflik memasuki fase *frozen conflict* yang ditandai oleh gencatan senjata tanpa penyelesaian politik yang komprehensif dan berkelanjutan. Kondisi *frozen conflict* ini memperlihatkan bahwa konflik Nagorno-Karabakh tidak semata-mata didorong oleh perbedaan etnis, tetapi juga berkaitan erat dengan persoalan legitimasi negara dan pembentukan identitas nasional pasca-Soviet. Bagi Armenia dan

Azerbaijan, Nagorno-Karabakh menjadi simbol kedaulatan, identitas nasional, dan eksistensi negara. Oleh karena itu, kompromi politik sering kali dipersepsikan sebagai ancaman terhadap kepentingan nasional, sehingga upaya penyelesaian konflik melalui jalur diplomatik mengalami kebuntuan.

Upaya mediasi internasional, khususnya melalui *Organization for Security and Co-operation in Europe* (OSCE) Minsk Group, selama bertahun-tahun tidak mampu menghasilkan penyelesaian final. Kegagalan tersebut mempertahankan status quo yang rapuh dan membuka peluang bagi eskalasi konflik di masa depan. Eskalasi besar akhirnya terjadi pada tahun 2020, yang menandai perubahan signifikan dalam dinamika konflik Nagorno-Karabakh. Perang Nagorno-Karabakh tahun 2020 berlangsung selama enam minggu dan menunjukkan pergeseran besar dalam keseimbangan kekuatan antara Armenia dan Azerbaijan. Berbeda dengan konflik sebelumnya, Azerbaijan memasuki perang dengan keunggulan militer yang substansial. Modernisasi persenjataan, penggunaan teknologi drone secara masif, serta dukungan militer dan strategis dari Turki memberikan keuntungan signifikan bagi Azerbaijan. Faktor-faktor ini memungkinkan Azerbaijan untuk melakukan operasi militer yang lebih efektif dan terkoordinasi dibandingkan Armenia.

Perang 2020 berakhir dengan kemenangan Azerbaijan dan penandatanganan perjanjian gencatan senjata yang dimediasi oleh Rusia. Hasil perang ini mengubah secara drastis status quo teritorial yang telah bertahan hampir tiga dekade. Azerbaijan berhasil merebut kembali sebagian besar wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Armenia, sementara Rusia menempatkan pasukan penjaga perdamaian di wilayah tertentu Nagorno-Karabakh. Penempatan pasukan Rusia ini memperkuat posisi Moskow sebagai aktor keamanan utama di Kaukasus Selatan. Dari perspektif Hubungan Internasional, perang 2020 mencerminkan berlakunya logika realisme, di mana kekuatan militer dan dukungan aliansi eksternal menjadi faktor penentu dalam konflik antarnegara. Keberhasilan Azerbaijan menunjukkan bahwa perubahan distribusi kekuatan regional dapat memicu eskalasi konflik yang sebelumnya stagnan. Dalam sistem internasional yang bersifat anarkis, negara cenderung mengandalkan kapabilitas militer untuk mengamankan kepentingan nasionalnya.

Meskipun perang 2020 secara formal diakhiri dengan gencatan senjata, konflik Nagorno-Karabakh tidak sepenuhnya mereda. Periode 2021–2023 ditandai oleh berbagai insiden militer di perbatasan Armenia–Azerbaijan, ketegangan diplomatik, serta krisis kemanusiaan yang semakin memburuk di wilayah Nagorno-Karabakh. Salah satu isu paling krusial pada periode ini adalah blokade jalur Lachin, satu-satunya akses yang menghubungkan Nagorno-Karabakh dengan Armenia. Blokade tersebut memperburuk kondisi kehidupan penduduk sipil dan menimbulkan tekanan internasional terhadap Azerbaijan. Situasi ini mencapai titik krusial pada tahun 2023 ketika Azerbaijan melancarkan operasi militer singkat yang berujung pada pengambilalihan penuh wilayah Nagorno-Karabakh. Peristiwa ini memicu eksodus besar-besaran penduduk etnis Armenia dari wilayah tersebut, yang secara de facto menandai berakhirnya kontrol Armenia atas Nagorno-Karabakh. Perkembangan ini menunjukkan bahwa konflik Nagorno-Karabakh telah mengalami transformasi, dari konflik bersenjata konvensional menjadi konflik yang juga melibatkan tekanan politik, ekonomi, dan kemanusiaan.

Konflik Nagorno-Karabakh tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan aktor regional dan internasional. Rusia memainkan peran ganda sebagai mediator dan aktor keamanan utama di

Kaukasus Selatan. Meskipun Rusia berhasil memediasi gencatan senjata pada 2020, efektivitas peran penjaga perdamaian Rusia dipertanyakan setelah perkembangan konflik pada 2023. Hal ini menunjukkan keterbatasan Rusia dalam mengendalikan dinamika konflik di tengah perubahan kepentingan geopolitik regional. Turki muncul sebagai aktor regional penting yang secara terbuka mendukung Azerbaijan, baik secara militer maupun diplomatik. Dukungan ini mencerminkan ambisi geopolitik Turki untuk memperluas pengaruhnya di Kaukasus Selatan dan memperkuat posisinya sebagai kekuatan regional. Di sisi lain, Uni Eropa berupaya meningkatkan keterlibatannya melalui diplomasi dan misi pemantauan di wilayah Armenia–Azerbaijan. Meskipun peran Uni Eropa relatif terbatas, keterlibatan ini menunjukkan meningkatnya perhatian Eropa terhadap stabilitas Kaukasus Selatan sebagai bagian dari arsitektur keamanan Eropa.

Dari sudut pandang keamanan regional, konflik Nagorno-Karabakh memiliki implikasi yang luas bagi kawasan Kaukasus Selatan. Eskalasi konflik meningkatkan ketidakstabilan politik dan keamanan, serta memperkuat ketergantungan negara-negara kawasan terhadap aktor eksternal. Kondisi ini menciptakan pola keamanan asimetris, di mana negara-negara kecil sangat bergantung pada kekuatan besar untuk menjamin stabilitas. Selain itu, konflik ini juga berdampak pada isu keamanan non-tradisional, seperti krisis kemanusiaan, pengungsi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam perspektif teori realisme, konflik Nagorno-Karabakh mencerminkan persaingan kepentingan nasional dan perebutan kekuasaan dalam sistem internasional yang anarkis. Armenia dan Azerbaijan bertindak berdasarkan kepentingan nasional masing-masing, dengan kekuatan militer sebagai instrumen utama dalam mencapai tujuan politik. Sementara itu, konsep keamanan regional menjelaskan bagaimana konflik ini membentuk dan dibentuk oleh dinamika kawasan Kaukasus Selatan, di mana instabilitas di satu wilayah dapat dengan cepat memengaruhi wilayah lain.

Dengan demikian, konflik Nagorno-Karabakh pada periode 2020–2023 dapat dipahami sebagai hasil dari interaksi kompleks antara faktor historis, etnis, politik, dan geopolitik. Konflik ini tidak hanya mencerminkan sengketa bilateral antara Armenia dan Azerbaijan, tetapi juga menunjukkan bagaimana konflik regional berinteraksi dengan kepentingan aktor eksternal dan membentuk pola keamanan kawasan. Analisis ini menegaskan bahwa penyelesaian konflik Nagorno-Karabakh memerlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada aspek militer dan teritorial, tetapi juga pada dimensi keamanan regional dan kemanusiaan secara lebih luas.

## **KESIMPULAN**

Konflik Nagorno-Karabakh antara Armenia dan Azerbaijan pada periode 2020–2023 menunjukkan bahwa sengketa wilayah yang berakar pada perbedaan klaim historis, identitas etnis, dan kepentingan nasional masih menjadi salah satu sumber utama instabilitas keamanan regional di kawasan Kaukasus Selatan. Konflik ini tidak hanya mencerminkan pertentangan bilateral antara dua negara, tetapi juga menggambarkan kompleksitas konflik regional yang dipengaruhi oleh dinamika kekuatan eksternal dan keterbatasan mekanisme penyelesaian konflik internasional. Perang Nagorno-Karabakh tahun 2020 menjadi titik balik penting dalam konflik ini, terutama karena terjadinya perubahan signifikan dalam keseimbangan kekuatan militer. Keberhasilan Azerbaijan merebut kembali sebagian besar wilayah yang disengketakan menandai berakhirnya status quo pasca-1994 dan menegaskan bahwa keunggulan militer, dukungan teknologi, serta aliansi strategis memainkan peran krusial dalam konflik teritorial

kontemporer. Kondisi ini memperkuat pandangan realisme dalam Hubungan Internasional yang menempatkan kekuatan dan kepentingan nasional sebagai faktor utama dalam perilaku negara.

Periode pascaperang 2021–2023 memperlihatkan bahwa berakhirnya konflik bersenjata tidak serta-merta menghasilkan stabilitas keamanan yang berkelanjutan. Ketegangan di perbatasan, krisis kemanusiaan akibat blokade Koridor Lachin, serta pengambilalihan penuh Nagorno-Karabakh oleh Azerbaijan pada tahun 2023 menunjukkan pergeseran bentuk konflik dari konfrontasi militer terbuka menuju tekanan politik dan keamanan non-tradisional. Dampak konflik terhadap masyarakat sipil, khususnya pengungsian massal penduduk etnis Armenia, menegaskan pentingnya pendekatan keamanan manusia dalam menganalisis konflik regional. Dari perspektif hukum internasional, konflik Nagorno-Karabakh memperlihatkan ketegangan antara prinsip keutuhan wilayah negara dan hak penentuan nasib sendiri. Meskipun komunitas internasional secara konsisten mengakui Nagorno-Karabakh sebagai bagian dari kedaulatan Azerbaijan, lemahnya implementasi resolusi internasional dan tidak efektifnya mekanisme mediasi memperpanjang konflik dan meningkatkan biaya kemanusiaan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum internasional, tanpa dukungan politik dan komitmen aktor-aktor utama, memiliki keterbatasan dalam menyelesaikan konflik teritorial yang kompleks.

Keterlibatan aktor eksternal seperti Rusia, Turki, dan Uni Eropa memperkuat dimensi geopolitik konflik Nagorno-Karabakh dan menempatkan Kaukasus Selatan sebagai wilayah strategis dalam arsitektur keamanan Eropa. Persaingan pengaruh antaraktor eksternal tersebut tidak hanya membentuk dinamika konflik, tetapi juga memengaruhi prospek perdamaian jangka panjang di kawasan ini. Dengan demikian, konflik Nagorno-Karabakh tidak dapat dipandang sebagai konflik lokal semata, melainkan sebagai bagian dari dinamika keamanan regional yang lebih luas. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa konflik Nagorno-Karabakh pada periode 2020–2023 mencerminkan karakter konflik regional kontemporer yang multidimensional, di mana faktor militer, politik, hukum internasional, dan kemanusiaan saling berinteraksi. Penyelesaian konflik yang berkelanjutan di Kaukasus Selatan memerlukan pendekatan komprehensif yang tidak hanya berfokus pada stabilitas teritorial, tetapi juga pada rekonsiliasi politik, perlindungan hak asasi manusia, serta keterlibatan konstruktif komunitas internasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Cornell, S. E. (2017). *The Nagorno-Karabakh conflict*. Uppsala University, Department of East European Studies.
- [2] De Waal, T. (2013). *Black garden: Armenia and Azerbaijan through peace and war*. New York: New York University Press.
- [3] De Waal, T. (2020). *The Nagorno-Karabakh conflict after the 2020 war*. Carnegie Europe.
- [4] Human Rights Watch. (2021). *Azerbaijan/Armenia: Civilians must be protected in conflict zones*. Human Rights Watch.
- [5] International Crisis Group. (2020). *Nagorno-Karabakh conflict: A dangerous escalation*. Brussels: ICG.
- [6] International Crisis Group. (2023). *Azerbaijan's takeover of Nagorno-Karabakh: Implications and risks*. Brussels: ICG.

- [7] Kaufman, S. J. (2001). *Modern hatreds: The symbolic politics of ethnic war*. Ithaca: Cornell University Press.
- [8] King, C. (2008). *The ghost of freedom: A history of the Caucasus*. Oxford: Oxford University Press.
- [9] Lewis, J. R. (2014). Usability: Lessons Learned... and Yet to be Learned. *International Journal of Human-Computer Interaction*, 30(9), 663–684.
- [10] Mearsheimer, J. J. (2001). *The tragedy of great power politics*. New York: W. W. Norton & Company.
- [11] Organization for Security and Co-operation in Europe. (2020). *Statement of the OSCE Minsk Group Co-Chairs on the Nagorno-Karabakh ceasefire*. OSCE.
- [12] Organization for Security and Co-operation in Europe. (2022). *The OSCE and the Nagorno-Karabakh conflict*. OSCE.
- [13] Özkan, B. (2021). Turkey's role in the Nagorno-Karabakh conflict. *Mediterranean Quarterly*, 32(1), 1–17.
- [14] Perserikatan Bangsa-Bangsa. (1993). *United Nations Security Council Resolutions 822, 853, 874, and 884 on Nagorno-Karabakh*. United Nations.
- [15] Perserikatan Bangsa-Bangsa. (2023). *Statement on humanitarian situation in Nagorno-Karabakh*. United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs.
- [16] Rothman, J. (1997). *Resolving identity-based conflict in nations, organizations, and communities*. San Francisco: Jossey-Bass.
- [17] Sakwa, R. (2021). Russia and the post-Soviet space: The case of the South Caucasus. *International Affairs*, 97(3), 635–654.
- [18] Toucas, B. (2020). *Turkey's growing influence in the South Caucasus*. Center for Strategic and International Studies.
- [19] United Nations High Commissioner for Refugees. (2023). *Armenia refugee response plan: Nagorno-Karabakh displacement*. UNHCR.
- [20] Wæver, O., & Buzan, B. (2003). *Regions and powers: The structure of international security*. Cambridge: Cambridge University Press.
- [21] Zürcher, C. (2007). *The post-Soviet wars: Rebellion, ethnic conflict, and nationhood in the Caucasus*. New York: NYU Press.